



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 147 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
22. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah dokumen perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat RKA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan hasil evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN,
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
 - BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyusun RKA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 147

RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, disusun suatu rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Strategis dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu tiga tahun yang akan datang. Berdasarkan RPD yang dituangkan dalam Rencana Strategis maka disusunlah Rencana Kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dari satu sisi merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Perubahan Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dari sisi lain merupakan dokumen perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dimulai dari :

1. Persiapan penyusunan renja dimana persiapan penyusunan ini meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi renja, penyusunan agenda kerja dan pengumpulan data dan informasi;
2. Penyusunan rancangan renja meliputi perumusan rancangan renja dan penyajian rancangan renja;

3. Pelaksanaan forum OPD bertujuan untuk menyelaraskan program kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan anggaran yang berasal dari usulan-usulan melalui musrenbang;

4. Penetapan renja adalah pengesahkan renja oleh Kepala Daerah

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan penjabaran dan saling berkaitan dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 menggambarkan target indikator sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan target indikator satuannya telah ditetapkan dalam renstra dan akan dilaksanakan di tahun 2024.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 memuat indikasi daftar program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 190 Tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah

dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan;

20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;

21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Startegis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan tahun 2024 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan dalam jangka waktu tahunan sesuai renstra dan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah :

- a. Renja disusun untuk menjamin komitmen terhadap kesepakatan Program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
- b. Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci;
- c. Menjabarkan pencapaian hasil pelaksanaan program;
- d. Menjabarkan rencana dan target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam renstra tahun 2024;
- e. Memudahkan pengendalian dan evaluasi capaian target kinerja indikator tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024, serta memuat landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia, uraian mengenai hubungan antara Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, dan penjelasan mengenai sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM TAHUN LALU.

Bab ini terdiri dari 4 sub bagian yaitu:

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun lalu dan capaian Perubahan Renstra BKPSDM;
Membahas tentang pemberian nilai atau pertimbangan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun lalu dan capaian Renstra BKPSDM.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM;
Menguraikan sejumlah kegiatan/Kinerja Pelayanan BKPSDM untuk digolongkan atau dikelompokkan menurut kriteria tertentu.
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Menentukan tahapan-tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan dan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan serta dicantumkan dalam isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Melakukan tinjauan ulang (Review) terhadap rencana awal kegiatan - kegiatan dengan hasil yang ingin dicapai.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Menjelaskan tentang proses usulan program kegiatan serta mengkaitkan dengan segala isu-isu penting yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

Bab ini terdiri dari 3 Sub bagian meliputi

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional ;
Merupakan acuan terhadap kebijakan-kebijakan umum dalam penyusunan Rencana Kerja BKPSDM.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Harapan yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh BKPSDM dalam kurun waktu tertentu dengan rumusan

yang lebih spesifik, terstruktur, dan dapat diaplikasikan melalui Rencana Kerja.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

Meliputi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pihak tertentu dalam lingkungan BKPSDM serta penganggaran atau biaya yang dibutuhkan dalam merealisasikan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

Bab ini berisikan rencana kerja tahunan, target kinerja dan perkiraan pagu indikatif anggaran.

BAB V. PENUTUP

Suatu aksi atau tindakan koreksi (*corrective action*) sebagai lanjutan langkah dalam mencapai perbaikan dan atau mengembalikan segala kegiatan pada tujuan yang seharusnya.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan

Pagu awal belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan sebelum dirubah dalam DPA yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan tahun 2022 Rp. 11.312.239.227,-. Pagu sebesar tersebut dilaksanakan untuk membiayai 3 program yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan. Dalam pelaksanaannya total anggaran yang telah dialokasikan tersebut mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 14.158.871.237,-.

Dari pagu anggaran perubahan tahun 2022 Rp. 14.158.871.237,-, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 11.640.829.646,- sehingga persentase daya serap anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan sampai Desember 2022 sebesar 82,22%. Dari realisasi anggaran tersebut terdapat sub kegiatan yang realisasi dari penyerapan anggaran rendah yaitu sub kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN, Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dan Pengelolaan Promosi ASN masing-masing sebesar 26,84%, 52,11% dan 56,87%. Hal ini karena anggaran untuk Pengelolaan Mutasi ASN yang rencananya digunakan untuk uji seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi ditunda karena masih belum ada rekomendasi dari Komite ASN. Untuk Pengelolaan Promosi ASN juga berkaitan erat dengan dengan Pengelolaan Mutasi ASN dimana anggaran yang disiapkan untuk pengambilan sumpah jabatan pada Jabatan Pimpinan Tinggi ditunda karena belum dilaksanakan uji seleksi JPT tersebut dan untuk Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN anggaran perjalanan dinas disiapkan untuk kegiatan sidang kepangkatan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tidak diserap karena kegiatan tersebut juga dibatalkan karena adanya pandemi. Sedangkan program, kegiatan dan sub kegiatan sisanya berdasarkan realisasi telah memenuhi target. Hal ini

karena semua program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan didukung koordinasi serta evaluasi dengan instansi terkait atau mitra kerja sehingga hal-hal yang menjadi penghambat bisa diminimalisir. Implikasi dari realisasi tahun 2021 terhadap target capaian program adalah perlunya peningkatan dari kegiatan pendidikan pelatihan agar dapat mendongkrak target yang sudah ditetapkan. Dari hal tersebut rencan tindak lanjutnya adalah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas agar fokus peningkatan capaian program dapat terwujud.

Berikut tabel 2.1 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah tahun berjalan Kabupaten Pasuruan.

Tabel T-C.29

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
503	URUSAN PENUNJANG URUSAN									
50301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Penilaian SAKIP	80,80	80,79	80,70	80,79	100%	80,80	80,80	100%
50301201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
5,03E+09	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok	5 dok	100%
5,03E+09	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 lap	7 lap	7 lap	7 lap	100%	7 lap	7 lap	100%
50301202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	3 dok	100%
5,03E+09	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 org/bln	49 org/bln	49 org/bln	49 org/bln	100%	49 org/bln	49 org/bln	100%
5,03E+09	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 dok	13 dok	13 dok	13 dok	100%	13 dok	13 dok	100%
5,03E+09	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 dok	11 dok	11 dok	11 dok	100%	11 dok	11 dok	100%
50301205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan kepegawaian yang ditangani	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5,03E+09	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 org	0	0	0	0%	80 org	80 org	80%
50301206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	100%	4 layanan	4 layanan	100%
5,03E+09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	4 paket	100%
5,03E+09	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	4 paket	100%
5,03E+09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 lap	11 lap	12 lap	11 lap	92%	12 lap	12 lap	100%
5,03E+09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 lap	150 lap	200 lap	150 lap	75%	200 lap	200 lap	100%
50301207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah jenis pengadaan BMD yang dilaksanakan	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	1 jenis	100%
5,03E+09	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	0	0	0	0%	2 unit	2 unit	100%
5,03E+09	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	6 unit	6 unit	6 unit	0%	11 unit	11 unit	100%
50301208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang kantor	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%
5,03E+09	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 lap	36 lap	36 lap	36 lap	100%	36 lap	36 lap	100%
5,03E+09	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 lap	6 lap	6 lap	6 lap	100%	6 lap	6 lap	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
50301209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%
5,03E+09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 unit	33 unit	33 unit	33 unit	100%	33 unit	33 unit	100%
5,03E+09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	174 unit	174 unit	174 unit	174 unit	100%	174 unit	174 unit	100%
50302	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian	90%	80%	80%	80%	100%	80%	80%	90%
50302201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	5 layanan	5 layanan	5 layanan	5 layanan	100%	5 layanan	5 layanan	100%
5,03E+09	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
5,03E+09	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
5,03E+09	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	596 dok	596 dok	596 dok	596 dok	100%	596 dok	596 dok	100%
5,03E+09	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	6 lbg	2 lbg	2 lbg	2 lbg	100%	2 lbg	2 lbg	100%
5,03E+09	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 dok	0	0	0	0%	2 dok	2 dok	100%
5,03E+09	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2496 dok	11100 dok	11100 dok	11100 dok	100%	2496 dok	2496 dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
50302202	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah layanan mutasi, promosi, ujian dinas dan kenaikan pangkat	3 layanan	3 layanan	3 layanan	3 layanan	100%	3 layanan	3 layanan	100%
5.03E+09	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	4 dok	100%
5.03E+09	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	8510 dok	8510 dok	8510 dok	8510 dok	100%	8510 dok	8510 dok	100%
5.03E+09	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	4 dok	100%
50302203	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan diklat teknis fungsional	5 layanan	2 layanan	2 layanan	2 layanan	100%	2 layanan	2 layanan	100%
5.03E+09	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	80 org	0	80 org	80 org	100%	80 org	80 org	100%
5.03E+09	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	4 dok	100%
5.03E+09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	4 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
5.03E+09	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	160 org	0	0	0	0%	160 org	160 org	0%
50302204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen penilaian, evaluasi kinerja, penghargaan dan pelanggaran disiplin	6 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	3 dok	100%
5.03E+09	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9656 dok	9656 dok	4600 dok	4545 dok	100%	9656 dok	9656 dok	100%
5.03E+09	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 org	100 org	100 org	100 org	100%	100 org	100 org	100%
5.03E+09	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100%	1 lap	1 lap	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
50402	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai yang lulus diklat	65%	63,24%	64%	64,09%	100%	64,09%	64,09%	100%
5040202	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah layanan diklat struktural dan assesment jabatan	3 layanan	2 layanan	2 layanan	2 layanan	100%	2 layanan	2 layanan	100%
5,04E+09	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	80 org	0	0	0	0%	40 org	40 org	50%
5,04E+09	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	100%	2 lap	2 lap	100%
5,04E+09	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan PrajabatanTinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan untuk tahun 2021.

Kenaikan ataupun penurunan indikator merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada tabel 2.2 yang akan disajikan terdapat satu indikator tujuan dan lima indikator sasaran. Pada indikator tujuan yaitu indeks profesionalitas aparatur sipil negara mengalami kenaikan. Pada lima indikator sasaran yaitu persentase peningkatan kinerja ASN dalam penilaian SKP, persentase pegawai yang lulus diklat, persentase ASN yang lulus ujian tingkat I, II serta penyesuaian ijasah, persentase ASN yang memiliki kualifikasi ijasah S1/S/S3 dan penilaian SAKIP mengalami kenaikan sehingga diproyeksikan pada tahun berikutnya juga mengalami kenaikan sedangkan satu indikator sasaran dari enam indikator sasaran tersebut adalah persentase pelanggaran disiplin mengalami penurunan dan diproyeksikan pada tahun berikutnya mengalami penurunan. Penurunan tersebut bukan berarti sesuatu hal yang dianggap tidak berhasil dalam melaksanakan pelayanan instansi, akan tetapi pada indikator ini adalah berlawanan atau berbeda dengan lima indikator yang lain dimana semakin turun merupakan sebuah keberhasilan instansi dalam melaksanakan tugasnya.

Keberhasilan ini merupakan upaya berupa pembinaan, pelayanan, penegakan, pendidikan dan pelatihan terhadap seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Berikut ditampilkan tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan.

Tabel T-C.30
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Tujuan :											
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara			70,03	70,04	70,05	70,06	70,036	70,04	70,05	70,06	
	Sasaran :											
	Persentase pegawai yang lulus diklat			64%	65%	66%	67%	64,09%	64,09%			
	Persentase pelanggaran disiplin			0,16%	0,15%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%			
	Persentase peningkatan kinerja ASN dalam penilaian SKP			99%	99%	99%	99%	99%	99%			
	Persentase ASN yang memiliki kualifikasi ijazah setara S1/S2/S3			67%	68%	69%	70%	70,13%	70,13%			
	Persentase ASN yang lulus ujian tingkat 1,2,dan penyesuaian ijazah			75%	76%	77%	78%	77,54%	77,54%			
	Nilai SAKIP			A (80,79)	A (80,80)	A (80,81)	A (80,82)	A (81,64)	A (81,64)	A (81,65)	A (81,66)	
	Nilai Indeks Merit									280	285	

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Ada beberapa isu tuntutan masyarakat yang sedang dihadapi secara nasional berkaitan dengan Aparatur Negara diantaranya :

1. Rekrutmen Calon ASN dari Pelamar Umum untuk mengganti ASN yang memasuki BUP yang disiapkan penggantinya;
2. Penataan personil secara proporsional pada jabatan struktural/fungsional karena pensiun untuk disiapkan penggantinya melalui promosi/pengangkatan dan pelantikan;
3. Sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang disampaikan kepada seluruh aparatur/ASN untuk mengurangi pelanggaran disiplin sehingga dapat meningkatkan pelayanan;
4. Pengembangan data ASN melalui Sistem Kepegawaian (Simpeg);
5. Pengembangan sistem penilaian kinerja (Si-Kep);
6. Peningkatan kompetensi ASN melalui Diklat, Bimtek, Sosialisasi, Workshop dan lain-lainnya baik dibiayai oleh Pemerintah Daerah atau mandiri;
7. Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN.

Sesuai Renstra dan RPD Kabupaten Pasuruan yang terkait dengan bidang aparatur pemerintah, isu strategis pokok / isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah merupakan tahapan-tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya untuk dilaksanakan secara berkesinambungan. Prioritas utama tahapan pembangunan kedua pada penentuan isu-isu strategis antara lain meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penentuan isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 yang harus ditangani secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah yaitu:

1. Masih kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara khususnya tenaga teknis,
2. Masih kurangnya pegawai yang dikirim mengikuti pendidikan, tugas belajar, pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis dan mengajukan ijin belajar untuk meningkatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi,

3. Tuntutan pengelolaan tata Pemerintahan yang baik dan pelayanan prima namun tidak diimbangi dengan pemberian Formasi untuk kebutuhan pegawai dengan jumlah pegawai yang pensiun di Daerah,
4. Belum optimalnya sarana pendukung untuk memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang memadai.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yaitu :

1. Minimnya anggaran pendidikan dan pelatihan;
2. Kurang memahaminya pegawai terhadap peraturan kepegawaian;
3. Berubah-ubahnya peraturan tentang kepegawaian.

Dampak terhadap capaian Rencana Pembangunan Daerah yang menjadi sasaran tujuan renstra yaitu Indeks Profesionalitas ASN perlu ekstra termasuk fokus dalam penganggaran pada peningkatan kompetensi ASN agar indeks kompetensi ASN bisa didongkrak.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan kepegawaian dan pendidikan pelatihan aparatur antara lain :

Tantangan :

1. Minimnya anggaran diklat;
2. Berubah-ubahnya peraturan kepegawaian.

Peluang :

1. Adanya ASN yang mengikuti diklat/bimtek secara mandiri;
2. Upaya sosialisasi secara kontinyu.

Dari isu-isu strategis, rekomendasi, catatan-catatan penting maka dilanjutkan dengan penyusunan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta anggaran yang harus selaras dengan ranwal RKPD dan renstra.

2.4 Review terhadap Rencana awal RKPD

Dalam penyusunan renja perlu melakukan perbandingan ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang nantinya menjadi dasar dalam menyusun anggaran program dan kegiatan. Adapun tujuan dari membandingkan ranwal RKPD dengan analisis kebutuhan adalah RKPD merupakan dasar utama dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran dalam renja OPD selain itu juga bertujuan menyelaraskan dan mensinkronisasikan program, kegiatan yang ada di RKPD dengan yang ada di renja OPD sehingga tujuan utama menjadi selaras dan mendukung pelaksanaan RPD Kabupaten Pasuruan. Adapun hasil proses tersebut tidak

ada perbedaan atau selaras antara ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Sehubungan dengan hal tersebut kami lampirkan tabel Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2021 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan. Tabel 2.3 Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2024.

Tabel T-C.31

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : BKPSDM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Pas	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	84%	11.343.868.330	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Pas	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	84%	11.343.868.330	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Pas	<i>Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi</i>	90%	22.382.600	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Pas	<i>Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi</i>	90%	22.382.600	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	9.058.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	9.058.600	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 lap	13.324.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 lap	13.324.000	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Pas	<i>Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan</i>	100%	8.657.635.600	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Pas	<i>Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan</i>	100%	8.657.635.600	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 org/bln	7.883.943.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 org/bln	7.883.943.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 dok	665.349.600	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 dok	665.349.600	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 dok	108.343.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 dok	108.343.000	
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Pas</i>	<i>Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan</i>	<i>80%</i>	<i>130.521.600</i>	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Pas</i>	<i>Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan</i>	<i>80%</i>	<i>130.521.600</i>	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pas	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 org	130.521.600	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pas	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 org	130.521.600	
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Pas</i>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD</i>	<i>90%</i>	<i>630.431.660</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Pas</i>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD</i>	<i>90%</i>	<i>630.431.660</i>	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	188.985.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	188.985.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	118.045.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	118.045.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 lap	14.601.160	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 lap	14.601.160	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 lap	308.800.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 lap	308.800.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Pas	<i>Persentase pengadaan BMD yang terealisasi</i>	60%	927.953.870	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Pas	<i>Persentase pengadaan BMD yang terealisasi</i>	60%	927.953.870	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	596.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	596.000.000	
	Pengadaan Mebel	Pas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	126.003.870	Pengadaan Mebel	Pas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	126.003.870	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 unit	205.950.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 unit	205.950.000	
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Pas	<i>Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia</i>	90%	342.763.000	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Pas	<i>Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia</i>	90%	342.763.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 lap	238.215.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 lap	238.215.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 lap	104.548.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 lap	104.548.000	
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Pas	<i>Persentase BMD kondisi baik</i>	80%	632.180.000	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Pas	<i>Persentase BMD kondisi baik</i>	80%	632.180.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 unit	295.345.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 unit	295.345.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	174 unit	150.595.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	174 unit	150.595.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	186.240.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	186.240.000	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pas	Nilai aspek kinerja dan penempatan ASN sesuai formasi dan jabatan	234	6.921.275.188	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pas	Nilai aspek kinerja dan penempatan ASN sesuai formasi dan jabatan	234	6.921.275.188	
	<i>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</i>	<i>Pas</i>	<i>Nilai perencanaan kebutuhan pegawai</i>	<i>36,5</i>	<i>1.802.940.203</i>	<i>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</i>	<i>Pas</i>	<i>Nilai perencanaan kebutuhan pegawai</i>	<i>36,5</i>	<i>1.802.940.203</i>	
			<i>Nilai pengadaan ASN</i>	<i>39</i>				<i>Nilai pengadaan ASN</i>	<i>39</i>		
			<i>Nilai sistem informasi pegawai</i>	<i>12</i>				<i>Nilai sistem informasi pegawai</i>	<i>12</i>		
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pas	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 dok	38.109.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pas	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 dok	38.109.000	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Pas	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dok	1.307.901.203	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Pas	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dok	1.307.901.203	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pas	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	496 dok	94.025.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pas	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	496 dok	94.025.000	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Pas	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	6 lbg	96.565.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Pas	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	6 lbg	96.565.000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem	2 dok	180.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem	2 dok	180.000.000	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Pas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dok	86.340.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Pas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dok	86.340.000	
	<i>Mutasi dan Promosi ASN</i>	<i>Pas</i>	<i>Nilai promosi, mutasi dan rotasi pegawai</i>	<i>26,5</i>	<i>988.340.000</i>	<i>Mutasi dan Promosi ASN</i>	<i>Pas</i>	<i>Nilai promosi, mutasi dan rotasi pegawai</i>	<i>26,5</i>	<i>988.340.000</i>	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Pas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 dok	396.925.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Pas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 dok	396.925.000	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pas	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	8500 dok	132.040.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pas	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	8500 dok	132.040.000	
	Pengelolaan Promosi ASN	Pas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 dok	459.375.000	Pengelolaan Promosi ASN	Pas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 dok	459.375.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<i>Pengembangan Kompetensi ASN</i>	<i>Pas</i>	<i>Nilai pengembangan kompetensi teknis dan fungsional</i>	<i>11</i>	<i>2.816.889.985</i>	<i>Pengembangan Kompetensi ASN</i>	<i>Pas</i>	<i>Nilai pengembangan kompetensi teknis dan fungsional</i>	<i>11</i>	<i>2.816.889.985</i>	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Pas	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	140 org	610.657.485	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Pas	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	140 org	610.657.485	
	Pengelolaan Assesment Center	Pas	Jumlah dokumen pengelolaan assesment center	1 dok	500.000.000	Pengelolaan Assesment Center	Pas	Jumlah dokumen pengelolaan assesment center	1 dok	500.000.000	
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Pas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	12 dok	449.896.500	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Pas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	12 dok	449.896.500	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pas	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	140 org	150.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pas	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	140 org	150.000.000	
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Pas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	4 dok	953.168.000	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Pas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	4 dok	953.168.000	
	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Pas	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	160 org	153.168.000	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Pas	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	160 org	153.168.000	
	<i>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	<i>Pas</i>	<i>Nilai manajemen kinerja pegawai</i>	<i>71,5</i>	<i>1.313.105.000</i>	<i>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	<i>Pas</i>	<i>Nilai manajemen kinerja pegawai</i>	<i>71,5</i>	<i>1.313.105.000</i>	
			<i>Nilai penghargaan dan disiplin pegawai</i>	<i>37,5</i>				<i>Nilai penghargaan dan disiplin pegawai</i>	<i>37,5</i>		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pas	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dok	50.000.000	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pas	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dok	50.000.000	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9656 dok	453.856.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9656 dok	453.856.000	
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pas	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9656 lap	253.856.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pas	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9656 lap	253.856.000	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pas	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 org	321.115.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pas	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 org	321.115.000	
	Pembinaan Disiplin ASN	Pas	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 org	50.000.000	Pembinaan Disiplin ASN	Pas	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 org	50.000.000	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pas	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 lap	184.278.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pas	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 lap	184.278.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pas	Nilai aspek pengembangan karier dan peningkatan kompetensi pegawai	71,5	3.880.167.200	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pas	Nilai aspek pengembangan karier dan peningkatan kompetensi pegawai	71,5	3.880.167.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pas	Nilai peningkatan kompetensi manajerial	9	3.880.167.200	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pas	Nilai peningkatan kompetensi manajerial	9	3.880.167.200	
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pas	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	40 org	350.000.000	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pas	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	40 org	350.000.000	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pas	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 lap	612.410.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pas	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 lap	612.410.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan PrajabatanTinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Pas	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	2 dok	2.917.757.200	Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan PrajabatanTinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Pas	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	2 dok	2.917.757.200	
JUMLAH TOTAL					22.145.310.718						22.145.310.718

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tidak adanya usulan program dan kegiatan pada musrenbang tahun 2024 dikarenakan secara tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan OPD pendukung dimana bidang utamanya kepegawaian dan pendidikan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara.

Usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang tahun 2024 secara spesifik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan pada Rencana Kerja Tahun 2024 dituangkan ke dalam lampiran tabel 2.4.

Tabel T-C.32

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Pasuruan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Cat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengacu dari arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan terselenggaranya pemerintahan dan fungsi pelayanan publik yang prima secara professional serta berlandaskan iman dan taqwa hal ini diharapkan kegiatan berjalan searah dan tidak menyimpang dari kegiatan yang dilaksanakan.

Arah kebijakan nasional adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural sedangkan prioritas pembangunan nasional yaitu penguatan ketahanan ekonomi; pengembangan wilayah; peningkatan SDM; peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; penguatan infrastruktur; pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan stabilitas politik hukum dan transformasi pada publik.

Dengan melihat arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional serta kebijakan yang termuat pada Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka diambil arah kebijakan tahun 2024.

Arah kebijakan yang ditempuh adalah :

1. Meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap peraturan di bidang kepegawaian melalui pendidikan dan pelatihan
2. Meningkatkan pola-pola pengembangan karier pegawai sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku melalui pendidikan kedinasan
3. Meningkatkan disiplin pegawai dengan pemberian reward dan punishment, melakukan monitoring dan evaluasi, melaksanakan pengawasan/kontrol dan melakukan pembinaan kepada pegawai
4. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat, dan akurat untuk meningkatkan kepuasan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mengoptimalkan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK).

Kebijakan tersebut sudah termuat pada Renstra dan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia baik itu program dan penganggarannya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan Renja BKPSDM adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun kedepan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kewenangan dan fungsinya berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan memenuhi kebutuhan pegawai yang profesional, proporsional dan setara gender.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah dan mengadopsi dari RPD Kabupaten Pasuruan dalam hal ini tujuan yang terkait dengan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, maka ditetapkan tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan yaitu *“Meningkatnya Profesionalisme ASN”* dengan indikator tujuan yaitu :

“Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara”

Sasaran Renja BKPSDM adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terstruktur, terukur, dan dapat diaplikasikan secara nyata dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari program induk yakni Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkewajiban memberikan dukungan, motivasi yang kuat dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan fungsi/bidang kewenangannya. Berdasarkan

makna tersebut maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan periode 2024–2026 menetapkan 2 (dua) sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penerapan Manajemen ASN

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen-PAN RB) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, menegaskan bahwa suatu instansi pemerintah dapat dikatakan telah melaksanakan sistem merit apabila : (1) telah tersusun dan ditetapkan standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan; (2) perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja; (3) pelaksanaan seleksi dan promosi telah dilakukan secara terbuka dan transparan; (4) memiliki manajemen karir yang meliputi perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta; (5) menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN; (6) merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja individu; (7) memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; (8) memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN.

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

Indeks Sistem Merit

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi. Melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dipacu terus meningkatkan kualitas kinerja sejak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi hingga pelaporannya. Dalam pelaksanaan di lapangan, SAKIP juga menguji akuntabilitas seluruh proses yang berlangsung melalui kegiatan evaluasi atas implementasinya sehingga teruji kebenarannya.

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

Nilai SAKIP

Tabel 3.2.

Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	Target 2024
Tujuan :				
Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	54,67	54,70	54,72
Sasaran :				
Meningkatnya kompetensi aparatur sipil negara	Persentase pegawai yang lulus diklat	64,09%	65%	
Meningkatnya kinerja aparatur sipil negara	Persentase pelanggaran disiplin	0,13%	0,13%	
	Persentase peningkatan kinerja ASN dalam penilaian SKP	99%	99,7%	
Meningkatnya kualifikasi aparatur sipil negara	Persentase ASN yang memiliki kualifikasi ijazah setara S1/S2/S3	70,13%	71%	
	Persentase ASN yang lulus ujian tingkat 1,2,dan penyesuaian ijazah	77,54%	78%	
Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81,64	81,65	81,65
Meningkatnya Penerapan Manajemen ASN	Nilai Indeks Merit			280
Indikator Kinerja Daerah :				
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			
	Pendidikan Tinggi	66,35%	66,5%	66,65%
	Menengah	29,37%	29,38%	29,39%
	Dasar	4,28%	4,27%	4,26%
	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	13,11%	13,12%	13,13%
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	43,69%	43,74%	43,79%

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Kerja Tahun 2024

Program adalah bentuk instrumen yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah .

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tsb. Sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang dan jasa.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan Tupoksi OPDnya. Adapun tujuan ke 3 Rencana Pembangunan Daerah adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi. Sedangkan sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan tugas fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Meningkatkan birokrasi yang kapabel.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA
 - 1.1. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.3. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
 - 1.3.1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.4. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
 - 1.4.1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.3. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.4.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - 1.5.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.5.2. Pengadaan Mebel

- 1.5.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.7. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 - 2.1. *Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*
 - 2.1.1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - 2.1.2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - 2.1.3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - 2.1.4. Evaluasi Pemberhentian ASN
 - 2.1.5. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - 2.1.6. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 2.1.7. Pengelolaan Data Kepegawaian
 - 2.2. *Mutasi dan Promosi ASN*
 - 2.2.1. Pengelolaan Mutasi ASN
 - 2.2.2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - 2.2.3. Pengelolaan Promosi ASN
 - 2.3. *Pengembangan Kompetensi ASN*
 - 2.3.1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - 2.3.2. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
 - 2.3.3. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - 2.3.4. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
 - 2.3.5. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
 - 2.4. *Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*
 - 2.4.1. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 2.4.2. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 2.4.3. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 2.4.4. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - 2.4.5. Pembinaan Disiplin ASN

2.4.6. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.1. *Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional*

- 3.1.1. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 3.1.2. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
- 3.1.3. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan PrajabatanTinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

Dalam rangka melaksanakan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan menyusun Rencana Kerja tahun 2024 dan menguraikan dalam 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan yang keseluruhan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (APBD) Kabupaten Pasuruan, Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 Kabupaten Pasuruan terlampir pada bagian lampiran Tabel 4.1.

Tabel T-C.33

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : BKPSDM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Bidang Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
503	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
50301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	Pas	84%		11.343.868.330	APBD	84%	11.818.748.270	
					Belanja operasi	: 10.415.914.460			10.880.794.400	
					Belanja pegawai	: 7.992.286.000			8.092.286.000	
					Belanja barang dan jasa	: 2.423.628.460			2.788.508.400	
					Belanja modal	: 927.953.870			937.953.870	
50301201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	Pas	90%		22.382.600	APBD	90%	23.382.600	
					Belanja operasi	: 22.382.600			23.382.600	
					Belanja pegawai	: -			-	
					Belanja barang dan jasa	: 22.382.600			23.382.600	
					Belanja modal	: -			-	
5030120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pas	5 dok		9.058.600	APBD	5 dok	9.058.600	
					Belanja operasi	: 9.058.600			9.058.600	
					Belanja pegawai	: -			-	
					Belanja barang dan jasa	: 9.058.600			9.058.600	
					Belanja modal	: -			-	
5030120107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pas	7 lap		13.324.000	APBD	7 lap	14.324.000	
					Belanja operasi	: 13.324.000			14.324.000	
					Belanja pegawai	: -			-	
					Belanja barang dan jasa	: 13.324.000			14.324.000	
					Belanja modal	: -			-	
50301202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	Pas	100%		8.657.635.600	APBD	100%	8.759.564.500	
					Belanja operasi	: 8.657.635.600			8.759.564.500	
					Belanja pegawai	: 7.992.286.000			8.092.286.000	
					Belanja barang dan jasa	: 665.349.600			667.278.500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
					Belanja modal	:	-		-	
5030120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pas	49 org/bln		:	7.883.943.000	APBD	49 org/bln	7.983.943.000
					Belanja operasi	:	7.883.943.000			7.983.943.000
					Belanja pegawai	:	7.883.943.000			7.983.943.000
					Belanja barang dan jasa	:	-			-
					Belanja modal	:	-			-
5030120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pas	13 dok		:	665.349.600	APBD	13 dok	667.278.500
					Belanja operasi	:	665.349.600			667.278.500
					Belanja pegawai	:	-			-
					Belanja barang dan jasa	:	665.349.600			667.278.500
					Belanja modal	:	-			-
5030120203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pas	11 dok		:	108.343.000	APBD	11 dok	108.343.000
					Belanja operasi	:	108.343.000			108.343.000
					Belanja pegawai	:	108.343.000			108.343.000
					Belanja barang dan jasa	:	-			-
					Belanja modal	:	-			-
50301205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	Pas	80%		:	130.521.600	APBD	80%	130.521.600
					Belanja operasi	:	130.521.600			130.521.600
					Belanja pegawai	:	-			-
					Belanja barang dan jasa	:	130.521.600			130.521.600
					Belanja modal	:	-			-
5030120410	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pas	100 org		:	130.521.600	APBD	100 org	130.521.600
					Belanja operasi	:	130.521.600			130.521.600
					Belanja pegawai	:	-			-
					Belanja barang dan jasa	:	130.521.600			130.521.600
					Belanja modal	:	-			-
50301206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	Pas	90%		:	630.431.660	APBD	90%	682.382.700
					Belanja operasi	:	630.431.660			682.382.700
					Belanja pegawai	:	-			-
					Belanja barang dan jasa	:	630.431.660			682.382.700
					Belanja modal	:	-			-
5030120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pas	4 paket		:	188.985.000	APBD	4 paket	188.985.000
					Belanja operasi	:	188.985.000			188.985.000
					Belanja pegawai	:	-			-
					Belanja barang dan jasa	:	188.985.000			188.985.000
					Belanja modal	:	-			-
5030120605	Penyediaan Barang Cetakan	Jumlah Paket Barang	Pas	4 paket		:	118.045.000	APBD	4 paket	118.045.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Belanja operasi	: 118.045.000				118.045.000
					Belanja pegawai	: -				-
					Belanja barang dan jasa	: 118.045.000				118.045.000
					Belanja modal	: -				-
5030120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pas	12 lap		14.601.160	APBD		12 lap	16.552.200
					Belanja operasi	: 14.601.160				16.552.200
					Belanja pegawai	: -				-
					Belanja barang dan jasa	: 14.601.160				16.552.200
					Belanja modal	: -				-
5030120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pas	300 lap		308.800.500	APBD		300 lap	358.800.500
					Belanja operasi	: 308.800.500				358.800.500
					Belanja pegawai	: -				-
					Belanja barang dan jasa	: 308.800.500				358.800.500
					Belanja modal	: -				-
50301207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	Pas	60%		927.953.870	APBD		60%	937.953.870
					Belanja operasi	: -				-
					Belanja pegawai	: -				-
					Belanja barang dan jasa	: -				-
					Belanja modal	: 927.953.870				937.953.870
5030120701	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pas	1 unit		596.000.000	APBD		1 unit	596.000.000
					Belanja operasi	: -				-
					Belanja pegawai	: -				-
					Belanja barang dan jasa	: -				-
					Belanja modal	: 596.000.000				596.000.000
5030120705	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pas	2 paket		126.003.870	APBD		2 paket	126.003.870
					Belanja operasi	: -				-
					Belanja pegawai	: -				-
					Belanja barang dan jasa	: -				-
					Belanja modal	: 126.003.870				126.003.870
5030120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pas	26 unit		205.950.000	APBD		27 unit	215.950.000
					Belanja operasi	: -				-
					Belanja pegawai	: -				-
					Belanja barang dan jasa	: -				-
					Belanja modal	: 205.950.000				215.950.000
50301208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	Pas	90%		342.763.000	APBD		90%	452.763.000
					Belanja operasi	: 342.763.000				452.763.000
					Belanja pegawai	: -				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Belanja barang dan jasa : 342.763.000				452.763.000
					Belanja modal : -				-
5030120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pas	36 lap		238.215.000	APBD	36 lap	338.215.000
					Belanja operasi : 238.215.000				338.215.000
					Belanja pegawai : -				-
					Belanja barang dan jasa : 238.215.000				338.215.000
					Belanja modal : -				-
5030120803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pas	6 lap		104.548.000	APBD	6 lap	114.548.000
					Belanja operasi : 104.548.000				114.548.000
					Belanja pegawai : -				-
					Belanja barang dan jasa : 104.548.000				114.548.000
					Belanja modal : -				-
50301209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	Pas	80%		632.180.000	APBD	80%	832.180.000
					Belanja operasi : 632.180.000				832.180.000
					Belanja pegawai : -				-
					Belanja barang dan jasa : 632.180.000				832.180.000
					Belanja modal : -				-
5030120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pas	33 unit		295.345.000	APBD	33 unit	395.345.000
					Belanja operasi : 295.345.000				395.345.000
					Belanja pegawai : -				-
					Belanja barang dan jasa : 295.345.000				395.345.000
					Belanja modal : -				-
5030120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pas	174 unit		150.595.000	APBD	174 unit	250.595.000
					Belanja operasi : 150.595.000				250.595.000
					Belanja pegawai : -				-
					Belanja barang dan jasa : 150.595.000				250.595.000
					Belanja modal : -				-
5030120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pas	174 unit		186.240.000	APBD	1 unit	186.240.000
					Belanja operasi : 186.240.000				186.240.000
					Belanja pegawai : -				-
					Belanja barang dan jasa : 186.240.000				186.240.000
					Belanja modal : -				-
50302	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai aspek kinerja dan penempatan ASN sesuai formasi dan jabatan	Pas	234		6.921.275.188	APBD	240,5	7.143.421.000
					Belanja operasi : 6.921.275.188				7.143.421.000
					Belanja pegawai : -				-
					Belanja barang dan jasa : 6.921.275.188				7.143.421.000
					Belanja modal : -				-
50302201	Pengadaan, Pemberhentian	Nilai perencanaan	Pas	36,5		1.802.940.203	APBD	37,5	1.891.341.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	dan Informasi Kepegawaian ASN	kebutuhan pegawai			Belanja operasi	: 1.802.940.203				1.891.341.000
		Nilai pengadaan ASN		39	Belanja pegawai	: -			39,5	-
		Nilai sistem informasi pegawai		12	Belanja barang dan jasa	: 1.802.940.203			13	1.891.341.000
					Belanja modal	: -				-
5030220102	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pas	1 dok		38.109.000	APBD		Idok	43.436.000
					Belanja operasi	: 38.109.000				43.436.000
					Belanja pegawai	: -				-
					Belanja barang dan jasa	: 38.109.000				43.436.000
					Belanja modal	: -				-
5030220103	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Pas	1 dok		1.307.901.203	APBD		1 dok	1.378.120.000
					Belanja operasi	: 1.307.901.203				1.378.120.000
					Belanja pegawai	: -				-
					Belanja barang dan jasa	: 1.307.901.203				1.378.120.000
					Belanja modal	: -				-
5030220106	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pas	496 dok		94.025.000	APBD		490 dok	96.880.000
					Belanja operasi	: 94.025.000				96.880.000
					Belanja pegawai	: -				-
					Belanja barang dan jasa	: 94.025.000				96.880.000
					Belanja modal	: -				-
5030220108	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Pas	6 lbg		96.565.000	APBD		6 lbg	96.565.000
					Belanja operasi	: 96.565.000				96.565.000
					Belanja pegawai	: -				-
					Belanja barang dan jasa	: 96.565.000				96.565.000
					Belanja modal	: -				-
5030220110	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pas	2 dok		180.000.000	APBD		2 dok	180.000.000
					Belanja operasi	: 180.000.000				180.000.000
					Belanja pegawai	: -				-
					Belanja barang dan jasa	: 180.000.000				180.000.000
					Belanja modal	: -				-
5030220111	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Pas	1 dok		86.340.000	APBD		1 dok	96.340.000
					Belanja operasi	: 86.340.000				96.340.000
					Belanja pegawai	: -				-
					Belanja barang dan jasa	: 86.340.000				96.340.000
					Belanja modal	: -				-
50302202	Mutasi dan Promosi ASN	Nilai promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Pas	26,5		988.340.000	APBD		27,5	1.000.340.000
					Belanja operasi	: 988.340.000				1.000.340.000
					Belanja pegawai	: -				-
					Belanja barang dan jasa	: 988.340.000				1.000.340.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Belanja modal :	-			-
5030220201	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Pas	4 dok		396.925.000	APBD	4 dok	397.925.000
					Belanja operasi :	396.925.000			397.925.000
					Belanja pegawai :	-			-
					Belanja barang dan jasa :	396.925.000			397.925.000
					Belanja modal :	-			-
5030220202	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pas	8500 dok		132.040.000	APBD	8510 dok	133.040.000
					Belanja operasi :	132.040.000			133.040.000
					Belanja pegawai :	-			-
					Belanja barang dan jasa :	132.040.000			133.040.000
					Belanja modal :	-			-
5030220203	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Pas	4 dok		459.375.000	APBD	4 dok	469.375.000
					Belanja operasi :	459.375.000			469.375.000
					Belanja pegawai :	-			-
					Belanja barang dan jasa :	459.375.000			469.375.000
					Belanja modal :	-			-
50302203	Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	Pas	11		2.816.889.985	APBD	12	2.934.935.000
					Belanja operasi :	2.816.889.985			2.934.935.000
					Belanja pegawai :	-			-
					Belanja barang dan jasa :	2.816.889.985			2.934.935.000
					Belanja modal :	-			-
5030220302	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Pas	140 org		610.657.485	APBD	140 org	624.740.000
					Belanja operasi :	610.657.485			624.740.000
					Belanja pegawai :	-			-
					Belanja barang dan jasa :	610.657.485			624.740.000
					Belanja modal :	-			-
5030220302	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah dokumen pengelolaan assesment center	Pas	1 dok		500.000.000	APBD	1 dok	500.000.000
					Belanja operasi :	500.000.000			500.000.000
					Belanja pegawai :	-			-
					Belanja barang dan jasa :	500.000.000			500.000.000
					Belanja modal :	-			-
5030220303	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Pas	12 dok		449.896.500	APBD	12 dok	533.859.000
					Belanja operasi :	449.896.500			533.859.000
					Belanja pegawai :	-			-
					Belanja barang dan jasa :	449.896.500			533.859.000
					Belanja modal :	-			-
5030220304	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan	Pas	140 org		150.000.000	APBD	140 org	150.000.000
					Belanja operasi :	150.000.000			150.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	
		Lanjutan			Belanja pegawai	:	-			-	
					Belanja barang dan jasa	:	150.000.000			150.000.000	
					Belanja modal	:	-			-	
5030220305	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Pas	4 dok			953.168.000	APBD		4 dok	963.168.000
					Belanja operasi	:	953.168.000				963.168.000
					Belanja pegawai	:	-				-
					Belanja barang dan jasa	:	953.168.000				963.168.000
					Belanja modal	:	-				-
5030220306	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Pas	160 org			153.168.000	APBD		160 org	163.168.000
					Belanja operasi	:	153.168.000				163.168.000
					Belanja pegawai	:	-				-
					Belanja barang dan jasa	:	153.168.000				163.168.000
					Belanja modal	:	-				-
50302204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai manajemen kinerja pegawai	Pas	71,5			1.313.105.000	APBD		72,5	1.316.805.000
		Nilai penghargaan dan disiplin pegawai		37,5			1.313.105.000			38,5	1.316.805.000
					Belanja pegawai	:	-				-
					Belanja barang dan jasa	:	1.313.105.000				1.316.805.000
					Belanja modal	:	-				-
5030220401	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pas	1 dok			50.000.000	APBD		1 dok	50.000.000
					Belanja operasi	:	50.000.000				50.000.000
					Belanja pegawai	:	-				-
					Belanja barang dan jasa	:	50.000.000				50.000.000
					Belanja modal	:	-				-
5030220402	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pas	9656 dok			453.856.000	APBD		9656 dok	455.556.000
					Belanja operasi	:	453.856.000				455.556.000
					Belanja pegawai	:	-				-
					Belanja barang dan jasa	:	453.856.000				455.556.000
					Belanja modal	:	-				-
5030220403	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pas	9656 lap			253.856.000	APBD		9656 lap	255.856.000
					Belanja operasi	:	253.856.000				255.856.000
					Belanja pegawai	:	-				-
					Belanja barang dan jasa	:	253.856.000				255.856.000
					Belanja modal	:	-				-
5030220404	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Pas	300 org			321.115.000	APBD		300 org	321.115.000
					Belanja operasi	:	321.115.000				321.115.000
					Belanja pegawai	:	-				-
					Belanja barang dan jasa	:	321.115.000				321.115.000
					Belanja modal	:	-				-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5030220405	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Pas	20 org		50.000.000	APBD	20 org	50.000.000
					Belanja operasi	: 50.000.000			50.000.000
					Belanja pegawai	: -			-
					Belanja barang dan jasa	: 50.000.000			50.000.000
					Belanja modal	: -		-	
5030220408	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pas	2 lap		184.278.000	APBD	2 lap	184.278.000
					Belanja operasi	: 184.278.000			184.278.000
					Belanja pegawai	: -			-
					Belanja barang dan jasa	: 184.278.000			184.278.000
					Belanja modal	: -		-	
50402	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai aspek pengembangan karier dan peningkatan kompetensi pegawai	Pas	71,5		3.880.167.200	APBD	72,5	3.902.235.920
					Belanja operasi	: 3.880.167.200			3.902.235.920
					Belanja pegawai	: -			-
					Belanja barang dan jasa	: 3.880.167.200			3.902.235.920
					Belanja modal	: -		-	
50402202	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Nilai peningkatan kompetensi manajerial	Pas	9		3.880.167.200	APBD	10	3.902.235.920
					Belanja operasi	: 3.880.167.200			3.902.235.920
					Belanja pegawai	: -			-
					Belanja barang dan jasa	: 3.880.167.200			3.902.235.920
					Belanja modal	: -		-	
5040220206	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Pas	40 org		350.000.000	APBD	40 org	350.000.000
					Belanja operasi	: 350.000.000			350.000.000
					Belanja pegawai	: -			-
					Belanja barang dan jasa	: 350.000.000			350.000.000
					Belanja modal	: -		-	
5040220207	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	Pas	2 lap		612.410.000	APBD	2 lap	626.345.920
					Belanja operasi	: 612.410.000			626.345.920
					Belanja pegawai	: -			-
					Belanja barang dan jasa	: 612.410.000			626.345.920
					Belanja modal	: -		-	
5040220208	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi	Pas	2 dok		2.917.757.200	APBD	2 dok	2.925.890.000
					Belanja operasi	: 2.917.757.200			2.925.890.000
					Belanja pegawai	: -			-
					Belanja barang dan jasa	: 2.917.757.200		2.925.890.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama			Belanja modal	:	-			-
	JUMLAH TOTAL						22.145.310.718			22.864.405.190
					Belanja operasi	:	21.217.356.848			21.926.451.320
					Belanja pegawai	:	7.992.286.000			8.092.286.000
					Belanja barang dan jasa	:	13.225.070.848			13.834.165.320
					Belanja modal	:	927.953.870			937.953.870

BAB V

PENUTUP

Berbagai potensi yang ada telah dan akan didayagunakan secara optimal baik anggaran, personel maupun sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran tugas-tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang kepegawaian dan kediklatan secara profesional dan proporsional.

Pada dasarnya rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan tahun 2024 telah mengacu pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan tahun 2024–2026 yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan, target kinerja yang dicapai baik itu input, output , maupun outcome serta jadwal pelaksanaan dari kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan.

Rencana kerja tahun 2024 sebagai wujud dalam tindak lanjut pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya.

Saran dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan sehingga tahun kedepan akan dihasilkan Rencana Kerja secara lebih baik dan handal sebagai media untuk perencanaan jangka pendek yang berorientasi pada *Continuous Improvement (perbaikan berkelanjutan)*.

Akhirnya kami berharap Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab dan bermanfaat dalam memberikan kontribusi pada peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF